



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))

Tahun Sidang : 2018-2019
Masa Persidangan : V
Rapat ke : 6
Jenis Rapat : Raker, RDP dan RDPU
Dengan : 1. Menteri Kesehatan RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Kepala BPKP;
4. Ketua DJSN;
5. Dirut BPJS Kesehatan.

Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Senin, 27 Mei 2019
Pukul : 15.30 WIB – selesai
Acara : 1. Membahas Hasil Review BPKP dan Penanggulangan defisit JKN;
2. Membahas kebijakan penanganan penyakit katastrofik, termasuk alternatif pembiayaan inovatif

Ketua Rapat : Ichsan Firdaus/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.
Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto/Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI.

Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I
Gedung Nusantara I
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Hadir : A. 28 orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI;
B. Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila F. Moeloek SpM (K) beserta jajaran;
C. Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani beserta jajaran;
D. Kepala BPKP, Ardan Adiperdana beserta jajaran;
E. Ketua DJSN, Tubagus Achmad Choesni beserta jajaran;
F. Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI dan Menteri Keuangan RI serta Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala BPKP, Ketua DJSN dan Dirut BPJS Kesehatan dibuka pukul 16.15 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Ketentuan Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, maka rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mengapresiasi kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah melakukan Audit dengan Tujuan Tertentu Atas Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan (DJS Kesehatan) Tahun 2018 Tahap I dan Tahap II.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dan BPJS Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah percepatan perbaikan sistem JKN berdasarkan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Dana Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2018 oleh BPKP.
3. Dalam rangka perbaikan sistem JKN, Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk:
 - a. mempertimbangkan bauran kebijakan untuk dijadikan sebagai kebijakan permanen (jangka panjang) dalam rangka menekan defisit JKN;
 - b. mengevaluasi peraturan terkait dana kapitasi guna mencegah mengendapnya dana kapitasi pada Puskesmas; dan
 - c. mengkaji rasionalisasi antara manfaat yang seharusnya diterima peserta dengan biaya iuran yang dikeluarkan oleh peserta.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk menindaklanjuti hasil review kelas RS berdasarkan audit BPKP dan hasil kredensial yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan peraturan perundangan.
5. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk melakukan perbaikan secara fundamental dan struktural terkait kepesertaan dan penerimaan iuran peserta Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sesuai dengan kontrak kinerja sebesar 60%, dan Bukan Pekerja (BP) sehingga dapat meningkatkan kepatuhan peserta/pemberi kerja dalam melakukan pembayaran iuran, termasuk dukungan pemerintah dalam pengenaan sanksi yang terdapat di dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun

2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

6. Komisi IX DPR RI meminta Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk mengkaji sistem iuran dan layanan kelas standar bagi peserta JKN dengan memperhatikan prinsip SJSN, serta memberikan rekomendasi terkait dengan besaran iuran.
7. Agar mempermudah koordinasi dalam rangka meninjau ulang seluruh kebijakan JKN terkait dengan penyakit katastropik, Komisi IX DPR RI mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat gugus tugas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat menentukan langkah-langkah jangka pendek maupun jangka panjang demi mencapai JKN yang berkelanjutan.
8. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk mempercepat proses *data cleansing* dan pemutakhiran data kepesertaan terhadap 27,443 juta peserta bermasalah berdasarkan rekomendasi hasil audit BPKP, paling lambat hari Selasa tanggal 30 Juli 2019.
9. Komisi IX DPR RI meminta BPKP untuk menyampaikan Resume Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Atas Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan (DJS Kesehatan) Tahun 2018 Tahap I dan Tahap II, paling lambat hari Senin tanggal 17 Juni 2019.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 00.15 WIB.

Ketua Rapat/
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI,



ICHSAN FIRDAUS
A-260